

BAB I

PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan alasan mengapa topik penelitian dipilih dan mengapa topik tersebut penting untuk diteliti. Rumusan masalah disusun untuk membantu memfokuskan arah penelitian. Batasan masalah dijelaskan agar ruang lingkup penelitian menjadi lebih jelas. Tujuan penelitian menunjukkan hasil yang ingin dicapai, sedangkan manfaat penelitian diharapkan bisa berguna bagi berbagai pihak yang berkepentingan.

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi pada era digital mendorong terjadinya transformasi signifikan dalam tata kelola administrasi publik di berbagai instansi pemerintah. Pemerintah pusat dan daerah dituntut untuk mengadopsi sistem informasi terintegrasi guna meningkatkan akurasi data, mempercepat proses pelayanan, serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara (Yusman et al., 2024). Transformasi digital tersebut sejalan dengan amanat Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang menekankan pemanfaatan teknologi informasi dalam seluruh proses kerja birokrasi pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Digitalisasi pengelolaan keuangan negara menjadi kebutuhan strategis karena mampu meminimalkan kesalahan pencatatan, mengurangi duplikasi data, serta meningkatkan efektivitas *monitoring* dan evaluasi secara *real-time* (Tantra, 2023).

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) memiliki peran strategis sebagai salah satu sumber pendapatan negara yang mendukung pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 mendefinisikan PNBP sebagai seluruh penerimaan pemerintah pusat di luar perpajakan yang diperoleh melalui pelayanan publik, pengelolaan sumber daya alam, dan pemanfaatan aset negara (Adhitama & Joshua, 2023). Institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia turut berkontribusi terhadap PNBP, salah satunya melalui layanan jasa pengamanan objek vital nasional maupun objek vital tertentu. Objek vital merupakan infrastruktur strategis yang memiliki peran penting terhadap hajat hidup masyarakat, stabilitas ekonomi, dan keamanan negara, seperti

pembangkit listrik, jaringan telekomunikasi, pelabuhan, kawasan industri strategis, serta sektor energi. Direktorat Pengamanan Objek Vital (Ditpamobvit) pada setiap Kepolisian Daerah, termasuk Ditpamobvit Polda Jawa Timur, bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pengamanan objek-objek vital tersebut.

Pengelolaan PNBP pada Ditpamobvit Polda Jawa Timur hingga saat ini masih didominasi oleh proses manual yang bersifat desentralistik. Setiap Kepolisian Resor (Polres) melakukan pencatatan transaksi PNBP layanan pengamanan menggunakan buku kas, dokumen fisik, dan *file Microsoft Excel* sebelum laporan dikirimkan ke tingkat Polda untuk dikonsolidasikan. Ketergantungan terhadap *Microsoft Excel* meningkatkan risiko terjadinya kesalahan manusia (*human error*), khususnya pada proses *inputan* data, penjumlahan nominal, dan penggunaan rumus yang tidak seragam antar satuan kerja (Umiyatin et al., 2025). Aplikasi *Excel* juga tidak menyediakan mekanisme *audit trail* yang memadai sehingga perubahan data sulit ditelusuri dan berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian saat proses pemeriksaan. Penyimpanan *file* yang tersebar pada berbagai perangkat dan periode pelaporan turut meningkatkan risiko duplikasi data serta perbedaan versi dokumen (Nasution, 2024). Kondisi tersebut berdampak pada rendahnya akurasi pelaporan dan melemahnya akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

Proses konsolidasi data Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Ditpamobvit Polda Jawa Timur melibatkan 39 satuan kewilayahan Kepolisian Resor (Polres) yang tersebar di seluruh wilayah Provinsi Jawa Timur. Satuan kerja tersebut meliputi Polrestabes Surabaya, Polres Malang Kota, Polres Malang, Polres Probolinggo, Polres Pasuruan, Polres Lumajang, Polres Bondowoso, Polres Situbondo, Polres Jember, Polresta Banyuwangi, Polres Kediri Kota, Polres Kediri, Polres Blitar, Polres Tulungagung, Polres Nganjuk, Polres Trenggalek, Polres Madiun Kota, Polres Madiun, Polres Ngawi, Polres Magetan, Polres Ponorogo, Polres Pacitan, Polres Bojonegoro, Polres Tuban, Polres Lamongan, Polres Pamekasan, Polres Bangkalan, Polres Sampang, Polres Sumenep, Polres Gresik, Polresta Sidoarjo, Polres Mojokerto, Polres Jombang, Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Polres Batu, Polres Probolinggo Kota, Polres Blitar Kota, Polres Pasuruan Kota, serta Polres Mojokerto Kota. Banyaknya jumlah Polres dengan sebaran wilayah yang luas, karakteristik objek vital yang beragam, serta perbedaan

intensitas layanan pengamanan menyebabkan proses pengelolaan dan konsolidasi data PNBPN menjadi kompleks apabila masih dilakukan secara manual. Kondisi tersebut berdampak pada lambatnya pelaporan, yang pada akhirnya menghambat proses *monitoring* capaian PNBPN serta menyulitkan pimpinan Ditpamobvit dalam mengambil keputusan berbasis data secara cepat dan tepat (Putri & Purnamawati, 2025). Selain itu, keterbatasan sistem manual juga menyebabkan *monitoring* capaian PNBPN belum dapat dilakukan secara *real-time*, sehingga berpotensi menurunkan efektivitas perencanaan dan pengalokasian sumber daya pengamanan objek vital, yang semakin memperkuat urgensi penerapan sistem informasi *monitoring* PNBPN yang terintegrasi dan berbasis digital.

Urgensi pengembangan sistem informasi *monitoring* PNBPN semakin diperkuat oleh temuan penelitian terdahulu. Penelitian (Pratama, 2023) menunjukkan bahwa penerapan sistem informasi PNBPN mampu meningkatkan ketepatan pelaporan, namun sistem yang dikembangkan masih menggunakan *PHP Native* sehingga memiliki keterbatasan dari sisi skalabilitas, keamanan, dan ketiadaan *audit trail* yang komprehensif.

Penelitian lain oleh (Nasution, 2024) meneliti pengaruh penerapan SAKTI terhadap kualitas laporan keuangan instansi pemerintah. SAKTI sebagai aplikasi keuangan terintegrasi berhasil meningkatkan konsistensi data, namun penelitian tersebut tidak mengembangkan sistem baru melainkan hanya mengevaluasi dampak implementasinya. Keterbatasan sistem SAKTI adalah tidak mendukung layanan PNBPN spesifik Ditpamobvit seperti transaksi jasa pengamanan objek vital.

Penelitian (Nanditasari, 2025) mengenai efektivitas SIMPONI sebagai sistem pembayaran PNBPN *online*. Penelitian tersebut menggunakan metode kuantitatif dan menunjukkan bahwa SIMPONI mampu meningkatkan pengendalian internal. Namun, SIMPONI tidak menyediakan manajemen transaksi internal Polres–Polda, sehingga tidak dapat digunakan untuk kebutuhan *monitoring* internal Ditpamobvit yang memerlukan rekapitulasi, verifikasi, dan analisis realisasi PNBPN per objek vital.

Penelitian (Putri & Purnamawati, 2025) mengenai SIPD menunjukkan keberhasilan integrasi data dalam perencanaan daerah menggunakan *framework* berbasis *web* dan pendekatan kualitatif. Namun, penelitian tersebut fokus pada

perencanaan dan penganggaran daerah, bukan pada *monitoring* PNBK kepolisian. Keterbatasan-keterbatasan tersebut mempertegas bahwa belum ada penelitian terdahulu yang secara spesifik membangun dan menguji sistem *monitoring* PNBK jasa pengamanan objek vital di lingkungan Ditpamobvit.

Berdasarkan kajian tersebut, penelitian ini memiliki tingkat urgensi yang tinggi karena berperan penting dalam mengisi celah penelitian (*research gap*) yang selama ini ada. Hal ini diwujudkan dengan mengembangkan sebuah sistem terintegrasi yang dirancang untuk memenuhi sejumlah kebutuhan kritis. Sistem tersebut tidak hanya mampu mengurangi *human error* yang sering timbul dari ketergantungan pada *Microsoft Excel*, tetapi juga menyediakan *audit trail* guna memperkuat akuntabilitas setiap proses. Selain itu, sistem ini mendukung konsolidasi data secara *real-time* dari tingkat Polres ke Polda, menghadirkan *dashboard* analitis yang komprehensif bagi pimpinan untuk pengambilan keputusan, serta mendukung proses pelaporan yang otomatis dan lebih cepat.

Dengan latar belakang tersebut, pengembangan Sistem Informasi *Monitoring* PNBK berbasis *web* menjadi solusi yang relevan dan diperlukan bagi Ditpamobvit Polda Jawa Timur. Sistem ini diharapkan mampu menciptakan proses pengelolaan PNBK yang lebih transparan, cepat, akurat, dan dapat dipantau secara terpusat melalui satu *platform* digital.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana merancang dan membangun *user interface* yang dapat digunakan oleh operator Polres jajaran untuk melakukan *input*, validasi, dan pemantauan data PNBK secara mudah, cepat, dan minim kesalahan?
2. Bagaimana mengembangkan dan menguji sistem *back-end* yang digunakan oleh operator pengompulir Satker Ditpamobvit Polda Jawa Timur untuk melakukan konsolidasi data, *monitoring real-time*, serta pengelolaan laporan PNBK secara terintegrasi dan akurat?

1.3 Batasan Masalah

Dalam penelitian ini, penulis menetapkan sejumlah batasan untuk memperjelas fokus dan lingkup kajian yang akan dibahas. Batasan-batasan tersebut dirumuskan sebagai berikut:

1. Sistem yang dibangun berbasis *web* dan dikhususkan untuk *monitoring* PNBPN internal Ditpamobvit Polda Jawa Timur dan Polres Jajaran.
2. Data yang diolah meliputi data jenis PNBPN, data setoran, data target penerimaan, dan data pengguna (*user*).
3. Fitur yang dikembangkan meliputi: *Login/Logout*, Manajemen Data Master (Jenis PNBPN, *User*), *Input* Transaksi PNBPN, *Monitoring Dashboard* (Grafik Realisasi vs Target), dan Cetak Laporan (Harian, Bulanan).
4. *Framework* yang digunakan adalah *Laravel 11* dan *database MySQL*.
5. Proses validasi pembayaran dan integrasi dengan sistem bank atau aplikasi keuangan lainnya tidak termasuk dalam ruang lingkup penelitian ini.

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terkait rumusan masalah yang telah disebutkan sebelumnya. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan antarmuka *front-end* yang dapat digunakan oleh operator Polres jajaran untuk melakukan *input*, validasi, dan *monitoring* data PNBPN secara efektif, mudah dipahami, serta mampu meminimalkan potensi kesalahan dalam pengolahan data.
2. Membangun dan menguji sistem *back-end* yang digunakan oleh operator pengompulir Ditpamobvit Polda Jawa Timur untuk melakukan konsolidasi, pengelolaan, serta *monitoring real-time* data PNBPN secara terintegrasi, akurat, dan sesuai dengan kebutuhan proses bisnis pengamanan objek vital.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1.5.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu Sistem Informasi melalui tiga aspek utama. Pertama, penelitian ini memperkaya literatur

mengenai digitalisasi proses bisnis sektor publik dengan menunjukkan bagaimana sistem informasi mampu menggantikan proses manual menjadi alur kerja yang terintegrasi dan otomatis. Kedua, penelitian ini menawarkan studi kasus penerapan *Framework Laravel* pada sistem informasi pemerintah, sehingga menjadi referensi untuk pengembangan aplikasi *web* yang aman, terstruktur, dan *scalable*. Ketiga, penelitian ini mengisi kesenjangan akademis terkait kurangnya penelitian mengenai sistem *monitoring* PNBP pada layanan pengamanan objek vital di lingkungan kepolisian.

1.5.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Instansi (Ditpamobvit Polda Jawa Timur):

- 1 meningkatkan efisiensi konsolidasi data dari Polres ke Polda melalui proses digital yang terpusat;
- 2 meningkatkan akurasi data dengan meminimalkan kesalahan *input* yang sering terjadi pada penggunaan *Excel*;
- 3 memperkuat pengambilan keputusan melalui *dashboard real-time* yang menampilkan capaian PNBP secara komprehensif; dan
- 4 meningkatkan akuntabilitas melalui *audit trail* yang merekam seluruh aktivitas transaksi.

b. Bagi Peneliti

Penelitian ini memberikan kesempatan kepada peneliti untuk menerapkan ilmu rekayasa perangkat lunak, pemrograman *web*, dan analisis sistem secara langsung pada kasus nyata, serta memperoleh pengalaman mengembangkan dan menguji sistem informasi pada lingkungan instansi pemerintah.

c. Bagi Akademisi

Penelitian ini memperkuat kontribusi universitas dalam mendukung modernisasi tata kelola instansi pemerintah melalui inovasi teknologi informasi. Selain itu, hasil penelitian dapat menjadi referensi dan landasan bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji pengembangan sistem informasi sektor publik.